

Relasi Gereja, Negara, dan Masyarakat: Etika Kristen pada Ketaatan dan Tanggung Jawab

Oey Natanael Winanto,¹ Johnnie Manopo,² Iswahyudi³

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Jakarta, Indonesia¹

Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Narwastu, Jakarta, Indonesia²

Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Tangerang, Jakarta³

Email: natanaelwinanto@gmail.com¹

Submitted: 20 Maret 2022 Revision: 13 September 2022 Accepted: 11 January 2023

Abstract

Christian ethics in the church, state and society, the political attitude of the Christian faith adheres to the principle of theocracy, namely the call of Christians to declare and realize God's will in the life of the nation, state, and society. The purpose of this writing is to find out how the role of the church is in politics and to apply the Christian faith in the development of politics, nation, and state. The writing method used is a literature review with a Christian ethics study approach. The result of the discussion is that one of the responsibilities and roles of Christians in the life of the nation and state is related to their political awareness in the form of forming organizations or parties that take part in politics. Christian ethics is ethics that stems from the acknowledgment that Jesus Christ is God. It means that He is God who controls, regulates all movements, steps, and goals of Christian life, according to the tasks given to His people.

Keywords: christian ethics, state, society, obedience, responsibility

Abstrak

Etika Kristen dalam bergereja, bernegaradan bermasyarakat, maka sikap politik iman Kristen berpegang pada asas teokrasi, yaitu panggilan umat Kristen untuk menyatakan dan mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tujuan penulisan ini adalah menemukan bagaimana peran gereja dalam politik dan mengaplikasikan iman Kristen dalam pembangunan politik, berbangsa, dan bernegara. Metode penulisan yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan studi etika Kristen. Hasil pembahasan adalah salah satu tanggungjawab dan peranan umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menyangkut kesadaran politiknya dalam wujud pembentukan organisasi atau partai yang berkiprah di dalam politik. Etika Kristen adalah etika yang berpangkal pada pengakuan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya, bahwa Ia adalah Tuhan yang menguasai, mengatur seluruh gerak, langkah dan tujuan hidup umat Kristen, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada umat-Nya.

Kata Kunci: etika kristen, negara, masyarakat, ketaatan, tanggung jawab

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki pedoman hidupnya masing-masing sebagai dasar dan sekaligus sebagai petunjuk bagaimana seharusnya untuk hidup. Etika Kristen adalah

etika yang berpangkal pada pengakuan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya, bahwa Ia adalah Tuhan yang menguasai, mengatur seluruh gerak, langkah dan tujuan hidup umat Kristen, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada umat-Nya (Mat.28:20). Menyangkut tema ini, maka sikap politik iman Kristen berpegang pada asas teokrasi, yaitu bahwa panggilan umat Kristen adalah menyatakan dan berusaha mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Untuk memahami ini, maka perlulah kita membahas beberapa hal penting, yaitu Gereja sebagai tubuh Kristus dan pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara. Kedua relasi ini bisa ditemukan kegagalan. Peran gereja dalam politik, bagaimana mengaplikasikan iman Kristen dalam pembangunan politik dan bagaimana gereja yang taat dan patuh kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Seperti yang dikatakan Pfeffer¹ dan Batalla² bahwa persoalan adalah gereja kurang berperan aktif ke dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selain itu, pembahasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan ini merupakan pelajaran akan pentingnya karakter dan kualitas negara bangsa yang disebut sebagai rumah. Kesenjangan dalam cara negara memperlakukan warganya yang beragama adalah pengingat bahwa, karena tidak semua budaya sama, begitu pula pemerintah. Terlepas dari apa yang diperjuangkan oleh rezim atau pemerintah, ada sesuatu yang menjamin keduanya—kedudukan mereka.³

Setiap negara-bangsa membentuk lingkungan nilai atau konteks nilai di mana hukum-hukumnya berlaku. Ini memberi bentuk atau tata bahasa moral pada jenis-jenis hukum yang dibuat sebagai ekspresi dari suasana budaya yang lebih luas, seperti di negara Indonesia. Sebagai contoh, negara yang kurang menghargai keluarga kandung akan menghasilkan undang-undang yang memungkinkan pembubaran keluarga dengan mudah. Menjadi masyarakat politik yang dibentuk oleh kerukunan mengenai hal-hal yang dicintai yang dimiliki bersama adalah benar untuk menegaskan pasti itu adalah manusia yang lebih baik atau lebih buruk karena bersatu dalam mencintai hal-hal yang

¹ Leo Pfeffer, "Church and State: Something Less than Separation," *The University of Chicago Law Review* 19, no. 1 (1951): 1, <https://doi.org/10.2307/1597719>.

² Eric Batalla and Rito Baring, "Church-State Separation and Challenging Issues Concerning Religion," *Religions* 10, no. 3 (March 15, 2019): 197, <https://doi.org/10.3390/rel10030197>.

³ Carl H. Esbeck, "Five Views of Church-State Relations in Contemporary American Thought," University of Missouri School of Law, 1986, <https://core.ac.uk/download/pdf/217048834.pdf>.

ada. lebih baik atau lebih buruk.⁴ Walker menyebut ini sebagai "ekologi moral" suatu bangsa. Sebuah negara bangsa harus sadar akan nilai-nilai yang ditanamkannya. Maka, apa yang diperlukan dari hal ini adalah bahwa tidak ada kontinum ruang-waktu atau geopolitik di mana konteks yang tidak bernilai dimungkinkan. Setiap negara-bangsa akan memiliki konteks yang ramah terhadap masalah agama atau tidak ramah. Ini juga berlaku untuk masalah moral atau politik lainnya.⁵

Apa artinya ini bagi umat Kristen—manusia yang mendiami suatu lokasi dan kewarganegaraan di bumi sambil juga mengklaim bahwa otoritas politiknya yang paling benar adalah Yesus Kristus dan keanggotaan mereka yang paling benar ada di dalam tubuh Kristus (Kis. 17:6-7; 1 Timotius . 3:15)? Sebagai masalah tata negara dan refleksi politik Kristiani, umat Kristiani hendaknya menginginkan agar tetangga global mereka mendiami negara-bangsa dan mengalami ekologi yang menghargai hak asasi manusia, martabat manusia, dan memajukan ketertiban yang adil sesuai dengan hukum moral Allah dan peraturan ciptaan.⁶

Ini dilakukan dengan harapan mengamankan apa yang disebut para pendiri sebagai "perdamaian domestik". Sebagaimana Para Pendiri mungkin menggunakan pergantian frasa ini, ini membuktikan prinsip alkitabiah yang lebih luas dan lebih dalam bahwa para penguasa harus "menghukum mereka yang berbuat jahat dan memuji mereka yang berbuat baik" (1 Petrus 2:14). Etika sosial Kristiani ingin memuliakan apa yang "baik" sesuai dengan aturan yang tertulis di hati (Roma 2:14-15). Ini berarti ketidakpedulian atau permusuhan terhadap lingkungan politik dan hasil yang berdampak pada tetangga global kita adalah pelepasan tanggung jawab sosial kristiani bagi tetangga global kita.⁷ Tentunya, pertanyaan Yesus tentang siapakah sesamaku? mendukung umat Kristen pada kepedulian yang berpikiran jernih terhadap negara-bangsa di panggung global. Kasih terhadap sesama tidak pernah dapat dipisahkan dari

⁴ Esbeck; Batalla and Baring, "Church-State Separation and Challenging Issues Concerning Religion."

⁵ Andrew T. Walker, "Freedom of Religion and the Christian Ethics of the Nation-State," Providence, 2019, <https://providencemag.com/2019/01/freedom-of-religion-and-the-christian-ethics-of-the-nation-state/>.

⁶ R.C. Sproul, "What Is a Christian's Responsibility to Government?," Ligonier, accessed November 19, 2016, <https://www.ligonier.org/learn/articles/christians-and-government>.

⁷ Marie Robert, Monique Séguin, and Kieron O'Connor, "The Evolution of the Study of Life Trajectories in Social Sciences over the Past Five Years: A State of the Art Review," *Advances in Mental Health* 9, no. 2 (October 17, 2010): 190–205, <https://doi.org/10.5172/jamh.9.2.190>; James Luchte, "Marx and the Sacred," *Journal of Church and State* 51, no. 3 (2009): 413–37, <http://www.jstor.org/stable/23921627>.

realitas dan implikasi politik yang menghasilkan akibat-akibat yang penuh kasih atau tidak kasih.

Dalam tradisi politik Kristen, negara adalah aturan ilahi, yang diperlukan bahkan dalam keadaan tanpa dosa (Roma 13:1-7). Peraturannya dimaksudkan untuk kebaikan rakyatnya, dan dengan demikian kedudukan sosial yang ditemukan umat Kristiani berarti ada tanggung jawab dan penatalayanan untuk melihat barang dan keadilan seperti itu diterapkan.⁸ Realitas negara-bangsa adalah panggilan untuk kewaspadaan, rasa syukur, dan tanggung jawab di bawah payung pemeliharaan Tuhan. Etika Kristen yang bertanggung jawab secara sosial memahami bahwa tata cara negara-bangsa—bahkan di dunia yang telah jatuh—menuntut pengawasan kenabian dengan harapan bahwa hal itu akan diselaraskan kembali dengan kebenaran sipil dan moral.⁹

Kita hidup di masa di mana warga dari hampir setiap negara di dunia berpaling ke dalam dan semakin curiga terhadap tatanan internasional. Tetapi umat Kristiani harus menyadari bahwa, sementara kita memiliki kewarganegaraan duniawi kita,¹⁰ solidaritas komunitas Kristiani juga berarti bahwa "warga kerajaan surga" (Filipi 3:20) melampaui batas-batas alamiah negara-bangsa sementara juga bekerja dalam parameter-parameter itu. negara-bangsa atas nama satu sama lain. Ini adalah ketegangan Tuhan memanggil umat Kristen untuk hidup di dalam konteks negara-bangsa sendiri (Matius 7:12).¹¹ Kita semua memiliki peran untuk dimainkan. Tugas misionaris adalahewartakan dan membagikan Injil, dan tugas ahli hukum dan ahli etika adalah mengolah tanah kondisi politik yang akan mematangkan konteks agar Injil disebarkan tanpa hambatan atau hambatan. Sementara umat kristiani dengan taat bersikeras bahwa Injil Allah akan maju dengan ketetapan providensia-Nya, adalah benar untuk melihat diri kita sebagai instrumen kehendak-Nya yang memperjuangkan nilai-nilai dalam negara-bangsa yang mencintai sesama kita dengan memanggil negara-bangsa yang terbaik. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji gereja,

⁸ Oliver O'Donovan and Joan Lockwood O'Donovan, *From Irenaeus to Grotius: A Sourcebook in Christian Political Thought* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1999).

⁹ Beatrice Leung, "Church-State Relations in the Transition: A Historical Perspective," in *Hong Kong in Transition* (London: Palgrave Macmillan UK, 2000), 229–47, https://doi.org/10.1057/9780333977262_13.

¹⁰ Esbeck, "Five Views of Church-State Relations in Contemporary American Thought."

¹¹ Thomas Robbins, *Church-State Relations: Tensions and Transitions*, 1st ed. (London, UK: Routledge, 1987).

negara, dan masyarakat dengan pendekatan etika Kristen pada ketaatan dan tanggung jawab.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini adalah kajian literatur. Metodologi penelitian literatur adalah membaca, menganalisis, dan memilah literatur untuk mengidentifikasi atribut penting dari bahan.¹² Perbedaannya yang signifikan dari metodologi lain adalah bahwa ia tidak secara langsung berurusan dengan objek yang diteliti, tetapi secara tidak langsung mengakses informasi dari berbagai literatur, yang umumnya disebut sebagai "metode non-kontak."¹³ Materi kajian merupakan kristalisasi penelitian literatur untuk mendapatkan sumber-sumber penelitian dan perkembangan ilmiah yang relevan dan untuk memahami apa yang telah dicapai oleh kajian dan kemajuan yang dicapai oleh kajian sebelumnya.¹⁴ Maka dengan demikian, tulisan menganalisis setiap pendapat, gagasan, dan ide yang representatif dengan topik gereja dan umat berelasi ke dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pada bagian awal tulisan ini membahas gereja sebagai tubuh Kristus dimana menyampaikan tri tugas panggilan gereja serta politik dan etika politik Kristen. Selanjut tulisan ini mengkaji peran gereja dalam politik, panggilan Gereja terhadap negara, dan bagian akhir menjelaskan bagaimana iman Kristen dalam pembangunan politik.

PEMBAHASAN

Gereja Sebagai Tubuh Kristus

Yang dimaksud sebagai gereja disini, adalah dari sudut pandang teologis dan esensinya. Dalam membicarakan gereja pada zaman ini, merupakan suatu pembicaraan yang sangat memprihatinkan. Sebabnya adalah, secara teoritis dan teologis gereja adalah suatu bangunan rohani atau yang disebut oleh umat Kristen adalah tubuh

¹² Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104 (November 2019): 333–39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>; Sin Wang Chong, Ting Jun Lin, and Yulu Chen, "A Methodological Review of Systematic Literature Reviews in Higher Education: Heterogeneity and Homogeneity," *Educational Research Review* 35 (February 2022): 100426, <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100426>.

¹³ Catherine L Winchester and Mark Salji, "Writing a Literature Review," *Journal of Clinical Urology* 9, no. 5 (September 23, 2016): 308–12, <https://doi.org/10.1177/2051415816650133>.

¹⁴ Rory J Piper, "How to Write a Systematic Literature Review: A Guide for Medical Students," *National AMR* 1, no. 2 (2013): 1–8.

Kristus yang berpondasikan Tuhan Yesus Kristus dengan fungsi persekutuan segala umat, segala bangsa, dan lapisan masyarakat sudah barang tentu hal ini harus dijiwai oleh semangat Roh Kudus agar nafas gereja, tidak ditempatkan pada hanya menyajikan menu kuasa semata dan atau memuaskan hati sekelompok golongan tertentu. Gereja Tuhan bukan tempat bersaing atau tempat mempromosikan model teologinya atau tempat melaksanakan kehendak dan ambisi pribadi, hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah haruslah dipahami bahwa gereja tidak sama dengan organisasi-organisasi dunia.¹⁵ Tugas utama gereja sebagai agen pembaharuan Kerajaan Allah adalah, memperbaharui dunia-manusia, struktur masyarakat dan sistemnya yang merupakan proses mempersiapkan kehadiran Kerajaan Allah yang sempurna pada masa yang akan datang.¹⁶

Tri Tugas Panggilan Gereja

Untuk memahami panggilan gereja, dapat dikelompokkan dalam tiga hal yang bersifat Integral,¹⁷ yaitu tugas pertama, koinonia. Koinonia memelihara persekutuan umat yang bertujuan meningkatkan iman dan pengabdianya kepada Yesus Kristus. Tugas utama ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga gereja untuk berperan serta secara aktif sesuai dengan karunia yang dimilikinya. Dengan demikian, gereja dituntut untuk memperjuangkan persekutuan dan persatuan umat Kristen, baik secara denominasional maupun interdenominasional. Tugas kedua, marturia. Marturia adalah kesaksian dan pemberitaan Injil kepada semua makhluk. Pemberitaan Injil meliputi proklamasi Injil keselamatan dan kemerdekaan manusia dari belenggu dosa untuk membebaskan manusia dari penindasan iblis. Dan kesaksian Injil dalam konteks pelayanan yang terpadu akan mampu menyentuh semua aspek kebutuhan hidup manusia yang menyangkut tubuh, jiwa dan roh. Tugas ketiga, diakonia. Diakonia merupakan mewujudkan kasih Allah kepada manusia pada umumnya baik di dalam

¹⁵ Esbeck, "Five Views of Church-State Relations in Contemporary American Thought"; Pfeffer, "Church and State: Something Less than Separation."

¹⁶ O'Donovan and O'Donovan, *From Irenaeus to Grotius: A Sourcebook in Christian Political Thought*.

¹⁷ Henry Mbaya, "Friendships and Fellowship: Living Koinonia, Martyria and Diakonia in the Corinthian Church of South Africa – from the Perspective of Social Capital," *HTS Theological Studies / Theological Studies* 68, no. 2 (February 14, 2012), <https://doi.org/10.4102/hts.v68i2.1169>; Thomas F. Torrance, "The Mission of the Church," *Scottish Journal of Theology* 19, no. 2 (1966): 129–43, <https://doi.org/10.1017/S0036930600002921>; Wayne Grundem, *Systematic Theology: An Introduction To Biblical Doctrine* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2009).

gereja maupun di luar gereja. Tugas dan panggilan ini harus dilaksanakan secara bersama dalam konsep “tubuh Kristus” baik secara local (jemaat) dan sinodal maupun interdenomisional. Sudah barang tentu gereja bukan saja dipanggil untuk tugas penatalayanan kedalam, tetapi juga turut terpanggil dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

Politik dan Etika Politik Kristen

Melihat keberadaan gereja yang cukup lama di dunia ini, namun masih saja memiliki masalah yang sangat pelik yang kita temui dan yang belum terpecahkan secara tuntas, yaitu persatuan di dalam dan antar gereja. Kita menyoroti sidang pertama di Yerusalem sebagai contoh, yaitu Paulus dan Barnabas berbantahan dengan para pengikut Yesus yang berasal dari Yudea, karena para pengikut dari Yudea mengkehendaki agar kaum lelaki non Yahudi yang baru menjadi pengikut Yesus harus disunat menurut hukum Taurat.¹⁸ Ini menjadi penyebab diadakannya sidang pertama di Yerusalem, dimana para pemimpin Jemaat berdiskusi mengenai siapa saja yang dapat menjadi anggota umat Allah yang baru (Kisah Para Rasul 15). Sampai sekarang masalah “persekutuan dan persatuan” gereja atau umat Kristen belumlah dapat dirumuskan bersama. Persekutuan dan persatuan telah menjadi masalah gereja sepanjang sejarah gereja.¹⁹ Apabila umat Kristen mau berkaca, secara jujur umat Kristen dapat berkata “apakah artinya pemberitaan Injil, pertumbuhan gereja dan kegiatan gereja lainnya, jika gereja-gereja tidak dapat bersekutu dan bersatu.

Perpecahan gereja (umat Allah) apapun alasannya, bukanlah ajang atau sarana pertumbuhan gereja. Karena jelas, perpecahan bukanlah kehendak Allah dan hal itu sangat bertentangan dengan doa Yesus yang tertuang dalam Injil Yohanes 17 dan pengajaran Yesus dalam Yohanes 13 dan surat 1 Yohanes 4:7-12. Pertentangan dan perpecahan harus diakui, terjadi di dalam tubuh Kristus. Ini disebabkan karena umat Kristen atau khususnya para pemimpin umat Kristen, tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus sebagai kekuatan yang dapat membimbing umat-Nya kepada segala kebenaran.²⁰

¹⁸ BK Putrawan et al., “Refleksi Pada Relasi Antara Teologi Dan Filsafat Dalam Perspektif Teologi Injili,” *Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 223–34.

¹⁹ Bobby Kurnia Putrawan, “Pengantar Latar Belakang Kitab Kisah Para Rasul (Introduction To Acts Background),” *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 1, no. 2 (2019): 176–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.46362/quaerens.v1i2.8>.

²⁰ Stephen Phang and Bobby Kurnia Putrawan, *Roh Kudus Dan Karya-Nya Bagi Gereja*, 1st ed. (Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, 2020).

Mereka lebih suka menjalankan tugas sendiri-sendiri, memaksakan kehendak sendiri dari pada melakukan kehendak Tuhan. Ini terjadi karena umat Kristen telah kehilangan “kasih Allah” sehingga tidak mampu lagi mengendalikan diri dan sebagai akibatnya, menjadi haus kekuasaan egoistis. Melihat ini, maka bagaimana mungkin umat Kristen dapat menjalankan “tri fungsi” panggilannya di dalam dunia ini. Perjuangan politik Perjanjian Lama, di dalam bangsa Israel sebagai contoh, bahwa mereka begitu gigih berjuang memasuki tanah Kanaan yang melimpah air susu dan madu. Mereka taat kepada pimpinan Allah sampai dapat memasuki wilayah yang dijanjikan Allah. Perjuangan yang sangat berat bagi bangsa Israel adalah masalah mempersatukan ke dua belas suku serta memelihara persatuan itu. Saul, raja Israel pertama bangsa Israel telah menjadi korban akibat perubahan sistem yang bersifat liturgis ke sistem yang bersifat administrasi kerajaan, ternyata bangsa ini belum siap dengan sistem yang baru.²¹ Daud tampil dan berhasil merumuskan sistem yang merupakan perpaduan dari yang bersifat liturgis dan pertumbuhan. Yang menonjol dari kepemimpinan Daud adalah ia takut akan Tuhan dan itulah yang menjadi sumber keberhasilan kepemimpinannya. Kaitan ini, alangkah baiknya para pemimpin umat Allah, harus melihat sejarah dari sikap politik gereja pada konferensi Malino tahun 1947, adanya sikap para tokoh-tokoh Kristen yang turut berjuang untuk membahas hubungan gereja dengan bangsa dan negara.²² M. Sondakh dengan gigih memberikan pandangannya mengenai negara sebagai “persekutuan hukum” dan gereja sebagai “persekutuan keampunan” (pengampunan) yang berdasarkan tanggung-jawab politik Kristen.²³ Dengan demikian, tugas gereja menurut terang Firman Tuhan adalah menyaksikan cinta kasih Allah di dalam hukum-hukum negara yakni, supaya negara menjadi satu negara hukum dimana hal-hal manusia sebagai yang terpenting, terutama dapat diatur, dihormati, dan berkuasa yang bukan saja dalam pikiran tapi juga dalam praktek. Dari hal ini,

²¹ Pieter Anggiat Napitupulu, Agus Santoso, and Bobby Kurnia Putrawan, “Rereading Qahal as Deuteronomist History Works: Literal and Ideological Criticism Approach,” *KURIOS* 8, no. 1 (April 30, 2022): 163, <https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.287>.

²² Samuel Benyamin Hakh, “Peranan umat Kristen Dalam Pusaran Politik Di Indonesia (Suatu Tinjauan Historis -Teologis),” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (November 25, 2019): 1–14, <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.15>.

²³ Zakaria J. Ngelow, “Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950,” Institut Leimena, 2018, <https://leimena.org/kekristenan-dan-nasionalisme/>.

melahirkan butir-butir rumusan Malino,²⁴ sebagai berikut: pertama, kesaksian tentang ke-Tuhanan Yesus Kristus dalam tugas Kristen terhadap bangsa dan negara. Kedua, perbedaan gereja sebagai persekutuan keampunan dengan negara yang adalah persekutuan hukum. Ketiga, umat Kristen bebas berpolitik, tetapi dalam ketaatan kepada Tuhan Allah adalah lebih daripada kepada manusia. Keempat, tugas-tugas gereja dalam pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Kelima, kesediaan orang Kristen bekerjasama dengan sesama warga yang beragama lain dalam membangun Bangsa. Jadi, tugas gereja dalam pembangunan bangsa lebih dibarengi tuntutan kebebasan bersama. Dan di dalam kebebasan itu, supaya gereja atau umat Kristen sebagai golongan minoritas dijamin dalam undang-undang.

Peran Gereja Dalam Politik

Umat Kristen menyadari bahwa gereja bukan wadah organisasi politik karenanya politik bukan urusan gereja. Namun demikian gereja sebagai bagian dari Negara atau dapat dikatakan masyarakat dari suatu Negara diaman ia berada, maka sewajarnya gereja haruslah berperan dalam pembangunan politik. Landasan teologis-etis Kristen dalam keterlibatannya pada masalah politik, tidaklah dibatasi pada masalah politik dalam artian sempit, tetapi dalam artian luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kepedulian terhadap masalah politik bukan hanya perlu melainkan wajib karena, umat Kristen disatu sisi adalah warga negara dan disisi lain ia adalah warga gereja yang dihadirkan Tuhan Allah di dunia ini untuk berkarya bagi dunia dan khususnya bagi bangsa dan negara.²⁵ Karenanya politik sangat penting bagi gereja.

Dalam kajian teologis-etis, politik dan teologi-etika tidak bisa dipisahkan. Politik dari bahasa Yunani "polis" dan "politea". Polis yang bermula berarti "benteng" lalu disebut "kota", kemudian menjadi "negara" (*city state*) dan kemudian menjadi bentuk negara demokrasi. Maka dalam arti yang terakhir, politik merupakan kewajiban semua manusia yang mendambakan kebebasan dan kemerdekaan hidup bersama dalam masyarakat. Sebelum gereja dapat memainkan perannya dalam politik, perlulah di

²⁴ Robert P. Borong, *Etika Politik Kristen Serba-Serbi Politik Praktis* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi dan Pusat Studi Etika, 2006); Ngelow, "Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950."

²⁵ Borong, *Etika Politik Kristen Serba-Serbi Politik Praktis*.

mengerti lebih dahulu tujuan dan tugas negara.²⁶ Alkitab memberikan penjelasan dan petunjuk, kaitan dengan tujuan dan tugas negara. Dalam Mazmur 72, Tuhan mengaruniakan kekuasaan kepada raja dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Nyanyian dan pujian dalam Mazmur ini, dapat kita pahami sebagai doa syafaat untuk pemerintah. Pada ayat 2 menjelaskan, “Kiranya ia (pemerintah) mengadili umat-Mu dalam kebenaran dan orang-orang-Mu yang tertindas dalam hukum”. Ayat 4 dan 5, “Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras.” “Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong; ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan” (ayat 12-14).

Jelaslah bahwa doa syafaat yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk pemerintah dalam Mazmur 72, supaya Tuhan sudi kiranya mengaruniai raja dengan hikmat di dalam tugas kekuasaannya. Kekuasaan haruslah berjalan bersama-sama dengan keadilan dan cinta kasih, kekuasaan haruslah bertindak terhadap ketidakadilan, harus memerangi kejahatan, harus melindungi yang lemah dan yang tanpa pelindung.²⁷ Karena Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan, keadilan dan cinta kasih. sudah barang tentu kemahakuasaan Allah bukanlah kelaliman. Dengan demikian, Ia menghendaki supaya pemerintah di dalam kekuasaan dan tugasnya, haruslah menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan karena Ia Maha Kasih dan Maha Adil.

Panggilan Gereja Terhadap Negara

Suatu pengantar; “berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat. 22:21). Firman yang tertuang ini, memberi penjelasan yang mendasar atas sikap kelompok Farisi yang licik terhadap Yesus.²⁸ Pertama, mereka akan menjerat Tuhan Yesus kaitan dengan perkataan dan perbuatan-Nya yang mereka ketahui bahwa Yesus adalah *Kurios*, Tuhan, Raja Kebenaran satu-satunya yang berdaulat secara mutlak. Kelompok Farisi ingin tahu bagaimana sikap Yesus terhadap kaisar, terhadap pemerintah. Mereka ingin tahu bagaimana sikap Kerajaan Allah yang diberitakan Yesus.

²⁶ Borong.

²⁷ Karel Sosipater, *Etika Pribadi* (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2012), 27.

²⁸ Batalla and Baring, “Church-State Separation and Challenging Issues Concerning Religion”; Pfeffer, “Church and State: Something Less than Separation.”

Kedua, mereka memperlakukakan kelompok Herodian yang pro kaisar untuk mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, “apakah diizinkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak.” Jika Yesus menjawab tidak, maka para Herodian itu akan menyuruh untuk menangkap Yesus dengan alasan, “Ia menantang pemerintah.” Dan jika Yesus menjawab ya, maka kelompok Farisi dapat berkata kepada rakyat, “bahwa Yesus adalah pengkhianat bangsa.” Yesus menanggapi sikap kaum Farisi yang penuh tipu muslihat itu, dengan mengembalikan pertanyaan mereka sendiri. Jawab Yesus adalah suatu panggilan untuk meninggalkan kepura-puraan dan tipu muslihat dan masuk ke dalam kebenaran kerajaan Allah. Yesus memintakan sebuah mata uang, lalu bertanya: “gambar dan tulisan siapakah ini?” dan mereka menjawab: “gambar dan tulisan Kaisar.” Berkatalah Yesus, “berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”²⁹

Tentu jawaban Yesus bukanlah bermaksud menciptakan dua lapangan: antara yang satu berbakti kepada Tuhan dan yang satu berbakti kepada kaisar atau berkompromi kepada Tuhan dan dengan Kaisar.³⁰ Maksud Yesus dalam Firman-Nya, memberikan kejelasan terhadap panggilan gereja terhadap Negara, bahwa umat Kristen adalah warga negara dua kerajaan, yaitu warga negara kerajaan Allah dan warga negara kerajaan dunia.

Iman Kristen Dalam Pembangunan Politik

Umat Kristen sebagai warga Negara yang bertanggungjawab harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan bangsa. Iman dan politik merupakan pokok bahasan yang sangat menarik untuk dibahas bagi setiap warga Negara yang bertanggung jawab. Dan sebagai warga gereja, tertantang dan terbuka kesempatan untuk hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.³¹ Kalau dilihat dari pembangunan bangsa, khususnya di Indonesia yang berfalsafah Pancasila, maka iman dan politik merupakan dua bahagian yang tak terpisahkan, dan bahkan saling

²⁹ Zakaria J. Ngelow, “Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik,” in *Teologi Politik, Panggilan Gereja Dibiidang Politik Pasca Orde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013); Rosalie Berger Levinson, “Separation of Church and State: And the Wall Came Tumbling Down,” *Valparaiso University Law Review* 18, no. 4 (1984): 707–39, <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol18/iss4/1>.

³⁰ Ngelow, “Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950.”

³¹ Jonathan Leeman, “The Relationship of Church and State,” The Gospel Coalition, 2019, <https://www.thegospelcoalition.org/essay/the-relationship-of-church-and-state/>.

melengkapi. Interaksi positif keduanya akan sangat mempercepat proses pembangunan bangsa. Sebagai contoh; yang berkaitan dengan PEMILU. Setiap umat Kristen dituntut untuk berpikir kritis berdasarkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dapat menggunakan hak politiknya sebaik mungkin untuk memilih dan menyalurkan aspirasinya sesuai dengan misi kristiani.³² Sudah barang tentu, hak politik disini merupakan salah satu hak asasi manusia harus dilaksanakan menurut hati nurani dengan tetap terorientasi pada kepentingan bangsa. Rasul Paulus memberi ajaran yang jelas dalam 1 Timotius 1:1-3, “naikan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua manusia, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan”.

Taat dan Patuh

Bagaimana umat Kristen menjalani kehidupannya berdasarkan kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus, bahwa kehadiran Kristus yang memindahkan kita ke dalam kerajaan kasih-Nya, dapat kita temui dalam terang Firman Tuhan yang menggairahkan. Yesus adalah “*soter*” yang bermakna penyelamat, bahwa “ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan dari cengkaman setan” (Kolose 1:13,14) penjelasan ini sangat jelas Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa”. Kristus yang telah membebaskan kita dari kekuasaan maut dan dosa, bukan supaya kita menjadi anarkis-anarkis, akan tetapi kita yang dibebaskan-Nya itu adalah supaya kita dengan suka rela dan dengan penuh suka cita dapat mengabdikan dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang telah menjadi pemilik sah hidup kita. Dalam hal umat Kristen mewujudkan ketaatan dan kepatuhan yang berkaitan dengan etika Kristen dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka pernyataan Rasul Paulus dalam Roma 13:1-7 menjadi terang buat etika Kristen.³³

Perikop ini tidak dapat dimengerti dengan baik bila dilepaskan pada konteksnya. Memang telah muncul beberapa pandangan, bahwa penulisan perikop ini disebabkan

³² Zakaria J. Ngelow, “Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia,” in *Teologi Politik, Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pasca Orde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIN, 2013); Ngelow, “Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950.”

³³ Josiah Dennis, “When Should Christians Obey the Government?,” *Proclaim & Defend: A Ministry of The FBFI*, 2020, <https://www.proclaimanddefend.org/2020/08/21/when-should-christians-obey-the-government/>.

oleh ancaman-ancaman yang dialami oleh jemaat Kristen di Roma yang kemungkinan berhubungan dengan kecendrungan-kecendrungan anarkis didalam kalangan jemaat Kristen tersebut. Kaitan ini, barngkali rasul Paulus terpaksa memperingatkan Jemaat Tuhan agar jangan memberontak dan melawan pemerintah (kaisar). Akan tetapi sesungguhnya pengalaman rasul Paulus dalam kaitan ini, bukan satu-satunya alasan untuk menulis suratn kitab Roma. Kalau ditelusuri dengan teliti Roma 13:1-8 dan Roma 12:21, maka terungkap bahwa rasul Paulus menaklukan segala sesuatu kepada “agape” (kasih Allah). Relasi umat Kristen dengan pemerintah dan negara. Apa yang tertuang dalam Roma 13:4, bahwa bagi pemerintah sebagai hamba Allah, maka kepada setiap umat Kristen sebagai masyarakat harus “taat dan patuh” kepada pemerintah, sepanjang pemerintah dapat menjalankan fungsinya, yaitu berjuang untuk keadilan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dengan tanpa memandang latar belakang golongan.³⁴ Pemerintah sebagai alatnya Tuhan, mengabdikan untuk kebaikan dan kebijakan umat atau masyarakatnya.

Politik Yesus

Yesus, kepada murid-murid-Nya memintakan supaya mereka mendoakan para penguasa di dunia ini agar mereka tidak memerintah dengan tangan besi, tetapi dengan keadilan, kejujuran dan ketulusa. (Markus 10:41-45). Dalam Markus 12:17 Yesus mempertegas ajaran-Nya, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Ajaran Yesus kepada murid-murid-Nya ini, bertujuan adalah supaya mereka bertindak adil, artinya; memberikan seseorang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etis alkitabiah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama manusia.

Tindakan kolusi, manipulasi dan korupsi dalam situasi apapun, sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Prinsip hidup umat Kristen yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus adalah tetap menjadi terang dan garam dunia. Sangat jelas, bahwa yang menjadi motivasi dasar bagi kelakuan umat Kristen adalah mematuhi peraturan-

³⁴ Greg F. Burke, “Book Review: Church, State, and Society: An Introduction to Catholic Social Doctrine” by Benestad J. Brian Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2010. 500 Pp.,” *The Linacre Quarterly* 79, no. 3 (August 2012): 373–75, <https://doi.org/10.1179/002436312804872776a>; Esbeck, “Five Views of Church-State Relations in Contemporary American Thought.”

peraturan sosial dan tidak melakukannya untuk manusia, melainkan untuk Tuhan (Kolose 3:23). Umat melayani Tuhan sebagai hamba-Nya, itulah yang dikehendaki-Nya (Kol.3:24).

Ketaatan kepada pemerintah tercakup apa yang disebut, "ibadah yang sejati". Namun harus juga kita pahami bahwa negara dan pemerintah tidak termasuk yang mutlak tetapi tergolong kepada yang akan berlalu, atau dianggap sebagai hal yang bersifat sementara (kontemporer). Akan tetapi, bahwa umat Kristen jangan bersikap acuh tak acuh kepada pemerintah. Justru sebagai warga negara kerajaan sorga, umat Kristen harus menghargai serta menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam dunia ciptaan Allah ini. Dari penjelasan rasul Paulus dalam Roma 13:2, menjadi jelas bagi etika Kristen menyangkut ketaatan dan kepatuhan, bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah dan karena itu pula tergantung kepada Allah. Yang dimaksud Paulus ialah, bahwa ketaatan umat Kristen terhadap pemerintah adalah sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah. Akan tetapi ketaklukan yang dimaksud bukanlah perhambaan yang tidak kritis ataupun penyerahan diri yang membabibuta, tidak. Semuanya harus wajar dan benar. Ketaatan Kristen tidak didasarkan pada alasan oportunistis atau alasan menghindarkan hokum-hukum yang menjadi ancaman dari pihak pemerintah.³⁵

Sebaliknya umat Kristen mengakui penguasa-penguasa Negara, karena umat Kristen sendiri merasa bertanggungjawab kepada para penguasa/pemerintah. Ketaatan yang dituntut dari umat Kristen, adalah ketaatan kepada penguasa negara Yang bersifat "ciptaan" dan karena itu pula pemerintah harus takluk kepada Allah sebagai "Pencipta". Dasar dan titik tolak ketaatan umat Kristen kepada pemerintah berdasarkan penjelasan Alkitab, dalam 1 Petrus 2:16 disebut "kemerdekaan". Yang dimaksud Kemerdekaan ini adalah, ia bebas menentukan haknya sebagai manusia. Dengan demikian, ketaatan yang diwarnai oleh kemerdekaan itu, tidaklah mungkin disamakan dengan ketaatan yang membabibuta pula. Karena umat Kristen bukan hamba pemerintah melainkan hamba Allah dan karena itu pula, umat Kristen adalah manusia merdeka.

Yewangoe memberikan rumusan mengenai hubungan gereja dan negara, yaitu: Pertama, gereja tidak boleh berdiri di atas negara. Kedua, negara tidak boleh berdiri di

³⁵ Josiah Dennis. "When Should Christians Obey the Government?" *Proclaim & Defend: A Ministry of The FBF*, August 21, 2020. <https://www.proclaimanddefend.org/2020/08/21/when-should-christians-obey-the-government/>.

atas Gereja. Ketiga, gereja dan negara berdiri terpisah dengan tugasnya masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu, bagi kesejahteraan semua umat manusia. Maka bagi etika Kristen yang bersikap merdeka, dan dalam keadaan yang normal, sikap ini dapat diwujudkan dalam kesetiaan, ketaatan dan dalam penghormatannya di dalam berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Alkitab mengajarkan prinsip hidup yang merupakan nilai-nilai kebenaran yang mendasar bagi warga gereja-Nya (Gal. 5:13). Bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah menjadi “hak khusus” pribadi yang merupakan karunia Allah bagi setiap umat Kristen. Yaitu mempunyai hak sebagai “anak-anak Allah” (Yoh. 1:12). Hal itu tersedia bagi setiap umat Kristen yang mau menanggapi tawaran keselamatan dari kasih Yesus. Karel Sosipater mengatakan hak khusus itu mencakup empat hal utama yaitu:

Kemerdekaan dari belenggu dosa

Setiap umat yang sebelumnya hidup tidak bebas karena “terbelenggu” oleh dosa, oleh kasih Yesus Kristus umat Kristen dapat “dimerdekakan”. Dalam konteks ini, rasul Paulus mengatakan, “supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan” (Gal. 5:1).

Merdeka dari ke-akuan

Kegagalan manusia dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia adalah karena kita membangun “keakuan” ini merupakan sebuah tembok pemisah, dan hal ini dapat berpotensi terjadinya “perseteruan”. Dalam Kejadian 3:5 dijelaskan, Kain yang keakuannya tersinggung dan tega membunuh adiknya Habel. Tuhan Yesus memerintahkan kepada umat percaya, supaya “mengasihi sesama” , seperti Mengasihi dirinya sendiri (Mat. 22:39). Mengasihi diri pribadinya dan mengasihi sesama adalah “wajib seimbang”. Umat Kristen yang telah dimerdekakan dari dosa, itu berarti hidupnya telah “disalibkan” bersama Kristus, maka keakuan telah turut mati disalibkan (Roma 14:8). Orientasi yang menjurus pada kepentingan keakuan diri sendiri, dapat menjadi sumber kejahatan.

Merdeka Dari Cengkraman Keinginan Tubuh

Alkitab menulis, “Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafu dan keinginannya” (Gal.5:24). Tubuh tidak dipandang rendah dalam agama Kristen, karena tubuh manusia ciptaan langsung dari Allah sendiri, bahkan nafasnyapun berasal dari nafas Allah yang dihembuskanke dalam hidung manusia (Kej. 2:7). Kedatangan Yesus ke dunia dalam wujud tubuh manusia adalah untuk melaksanakan misi yang diperintahkan Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia.

Kejatuhan manusia (Adam dan Hawa) ke dalam dosa, maka tubuh manusia menjadi “fana” (Kej. 3:19). Sejak saat itulah hukum kematian fisik telah menguasai manusia, sebagai akibat kutukan dari Allah. Lalu muncullah keinginan tubuh atau keinginan daging yang menuntut manusia untuk memenuhinnnya sepanjang masa (Roma 7:18-26). Di dalam keinginan tubuh manusia itu disebut oleh rasul Paulus adalah hawa nafsu, zinah, percabulan, kecemaran, persetruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan kedengkian (Gal. 5:19-21).

Kepatuhan Dan Kesetiaan

Kepatuhan terhadap hokum Tuhan tidak menjadi beban bagi setiap umat Kristen yang merdeka. Umat Kristen merdeka adalah karena “anugerah” dari kasih Yesus Kristus. Karena dasar hubungan umat Kristen dengan Allah bukan karena kepatuhan kepada hukum. Akan tetapi Tuhan yang menawarkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma (Mat. 10:8).

Etika Politik Dalam Pandangan Kristen

Umat dapat bertanya, apakah etika dan moral? Etika adalah ilmu atau ajaran tentang yang baik dan yang buruk dalam pikiran, perkataan dan perbuatan seseorang maupun masyarakat (kolektif). Moral adalah perilaku yang baik, benar, dan tepat dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersama (masyarakat).

Menyangkut etika dan moral Kristen, ia adalah nilai-nilai yang terkandung atau yang bersumber dari Firman Tuhan. Nilai-nilai yang diyakini umat beragama sebagai kebenaran mutlah dank arena itu mengungguli nilai-nilai yang ada dalam tradisi maupun filsafat, termasuk filsafat politik. Maka etika dan moral Kristen dalam politik adalah nilai-nilai etika dan panduan moral yang berkaitan dengan perilaku politik, yang

diimplementasikan dalam mengelola kehidupan bersama, yaitu bermasyarakat dan bernegara.³⁶

Taat Dan Patuh Kepada Pemerintah, Bangsa dan Negara

Bagaiman sikap umat Kristen dalam memahami bagian ini, maka harus dipahami dulu mengenai pemerintah dan tugasnya. Agar tidak salah dalam tugas kita sebagai umat Kristen dalam menjalankan kewajibannya. Dibagian atas telah diuraikan sedikit tentang kekuasaan Negara. Dalam pembahasan ini penulis menguraikan tentang pemerintah dan tugasnya. Alkitab menjelaskan dalam Roma 13:4, bahwa pemerintah sebagai “*diakonos theou*” yang artinya “diaken” atau “samas Tuhan”, hamba Tuhan (Roma.13:6). Tugas yang diberikan dan dijalankan oleh pegawai Tuhan itu, adalah “mendatangkan kebajikan, memberantas kejahatan dan untuk menjalankan murka Tuhan atas siapapun yang melakukan kejahatan. Tuhanlah yang mengangkat “diaken” atau “pegawai” yakni pemerintah untuk menegakkan dan mempertahankan keadilan dalam hubungan antara manusia dan manusia untuk menunjukan keselarasan dan rasa cinta kasih.³⁷

Ada tiga unsur dalam tugas pemerintah, yaitu pertama, Kekuasaan. Negara memerlukan kekuasaan untuk dapat berfungsi sebagai negara. Negara tanpa kekuasaan bukanlah negara, tetapi sama dengan perkumpulan debat. Negara memerlukan pusat aksi, pusat kegiatan yang diakui oleh rakyat sebagai pusat kegiatan. Tuhan menghendaki supaya negara itu mempunyai kekuasaan atau wewenang. Dengan demikian maka pemerintah dapat mempertahankan kekuasaan tanpa paksaan. Paksaan hanyalah cara atau alat untuk mempertahankan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan adalah tepat dan berarti, jika dilakukan untuk mempertahankan kewibawaan. Pemerintahan yang stabil, yang kekuasaannya diakui, apabila pemerintah menjalankan tugasnya demi kepentingan kedua segi lainnya yaitu “keadilan” dan “cinta kasih”.³⁸

Kedua, keadilan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan kepentingan keadilan. Tuhan adalah adil. Maka tugas negara untuk melaksanakan keadilan di wilayahnya dengan caranya sendiri. Negara dipanggil untuk menghormati dan menjamin hak-hak

³⁶. Robert .P.Borrong. “Etika Politik Kristen”, (Jakarta: studi etika stt Jakarta),7

³⁷ Borong, *Etika Politik Kristen Serba-Serbi Politik Praktis*.

³⁸ Ngelow, “Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950”; Muhadam Labolo, *Etika Pemerintahan*, 1st ed. (Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016).

peorangan, ia dipanggil untuk menjamin hak-hak golongan-golongan di dalam pergaulan mereka masing-masing sehingga mereka dapat hidup bersama-sama dengan keharmonisan atau dengan selaras. Keadilan negara dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dapat bertindak sebagai keadilan yang menghukum, apabila warganya bertindak melawan ketidakadilan, kesewenangan, dan perbuatan jahat. Dan juga keadilan negara, bertindak sebagai keadilan membagi-bagikan kepada mereka yang berhak memperolehnya. Juga menjamin warga negara untuk dapat menerima kesempatan untuk memajukan perkembangan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Keadilan adalah dinamis, dan dapat menciptakan. Dimana berada keadilan disitu terdapat ketentraman dan cinta kasih.³⁹

Ketiga, cinta kasih. Tugas negara bukan saja hanya melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan keadilan, tetapi juga untuk menyatakan cinta kasih. Tuhan adalah adil dan penuh cinta kasih. Tidak terdapat pertentangan antara cinta kasih Allah dan keadilan Allah. Pada dasarnya, keadilan dan cinta kasih adalah satu di dalam diri Allah. Pemerintah memiliki panggilan untuk melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan keadilan dan cinta kasih di lapangannya sendiri dan dengan caranya sendiri pula. Dalam berbagai pandangan mengenai negara, umat sering menempatkan kasih berhadapan dengan keadilan.⁴⁰ Lalu dikatakan, bahwa pemerintah hanya berurusan dengan keadilan dan bukan dengan cinta kasih. Akan tetapi yang harus diketahui adalah, tidak mungkin ada keadilan tanpa cinta kasih. Unsur positif dalam Keadilan dan pelaksanaan keadilan adalah cintakasih.

Kitab Muzmur 72 memberi penjelasan mengenai doa yang dipanjatkan kehadiran Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada pemerintah cintakasih kepada rakyatnya. Cinta kasih kepada yang miskin, yang lemah, yang tertindas dan yang tidak berdaya. Hubungan antara pemerintah dan rakyat haruslah merupakan hubungan antara dua pihak yang saling menyatakan cintakasih, karena itulah yang dikendaki Allah. Perhatian dan pemeliharaan yang penuh cintakasih adalah sifat yang sangat perlu dan mendasar bagi suatu pemerintahan. Pemerintah harus memiliki mata yang dapat melihat dengan jelas dimana terdapat penderitaan, harus memiliki hati yang penuh

³⁹ Ngelow, "Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950"; Labolo, *Etika Pemerintahan*.

⁴⁰ Ngelow, "Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950"; Labolo, *Etika Pemerintahan*.

cintakasih kepada setiap golongan. Dan harus memiliki tangan yang dapat diulurkan kepada tiap-tiap umat yang memerlukan pertolongan.⁴¹

Implementasi Gereja Dalam Ketaatan Terhadap Pemerintah, Bangsa dan Negara

Thomas Jefferson (Presiden Amerika ke-3) mengatakan: “seluruh pemerintahan tidak lain adalah seni menjadi jujur.”⁴² Setiap manusia yang lahir hidup dan bermukim dalam suatu Negara, berarti “terkait” dengan suatu pemerintahan. Pemerintah adalah suatu kawasan teritorial yang di dalamnya terdapat kumpulan beberapa manusia yang mampu berkuasa atas semua penduduknya. Pemerintah dengan segala program dan strateginya, dimana saja selalu berbicara akan berbaut baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah yang bekerja dengan baik dan menciptakan struktur pemerintahan yang stabil, dipastikan akan tercipta keharmonisan, keamanan dan kesejahteraan.⁴³ Pemerintah seperti inilah yang harus dihormati dan ditaati, karena Alkitab mengajarkan, bahwa umat Kristen di dalam sikap terhadap pemerintah harus melakukan perbuatan baik supaya di dalamnya Allah Bapa dimuliakan (1 Petrus 2:12; Titus 3:1). Di dalam surat-surat ini ditekankan bahwa rakyat sesuatu negara harus taat kepada pemerintahnya.

Salah satu tanggung jawab dan peranan umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menyangkut kesadaran politiknya dalam wujud pembentukan organisasi atau partai yang berkiprah di dalam politik. Sebagai contoh; Beberapa perkumpulan Kristen yang bercorak kesukuan atau kedaerahan, seperti misalnya Serikat Ambon, Rukun Minahasa, Perserikatan Timor, dan Hatopan Kristen Batak.⁴⁴ Pada PEMILU pertama 1955, tercatat banyak tokoh beragama Kristen menempatkan diri dikalangan nasionalis, seperti pada periode 1950-1955 kiprah politik umat Kristen yang tergambar melalui PARKINDO yang berjalan bersama dengan Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), kendati DGI bukan lembaga politik.⁴⁵

Ketaatan gereja atau umat Kristen kepada pemerintah serta bangsa dan Negara, terbatas pada panggilan dan tanggungjawab kepada Tuhan dan terhadap sesama manusia. Jan Aritonang, berkata, berdasarkan keyakinan umat Kristen, bahwa umat

⁴¹ Sosipater, *Etika Pribadi*, 361.

⁴² Sosipater, 186.

⁴³ Labolo, *Etika Pemerintahan*.

⁴⁴ Jan S.Aritonang. “Belajar Memahami Sejarah di Tengah Realitas”. (Jakarta:...),64.

⁴⁵ Ngelow, “Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia”; Ngelow, “Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950.”

Kristen bertanggung jawab atas keselamatan dan kebahagiaan negara Indonesia. Tanggung jawab itu pertama-tama terhadap Tuhan dan selanjutnya terhadap sesama manusia.⁴⁶ Tugas umat Kristen di Indonesia dalam lapangan kenegaraan ialah turut mengusahakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan ketertiban untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab umat itu baik pada kata maupun dengan perbuatan, berdasar pada rencana keselamatan Tuhan yang nyata dalam kitab suci umat Kristen. Yesus Kristus adalah Juruselamat dunia, demikian juga Juruselamat Indonesia.⁴⁷ Berdasarkan ini, gereja tidak bisa berdiam diri, tapi ia harus memainkan peran aktifnya yaitu menjadi terang dan garam. Inilah acuan dasar teologi, gereja harus menerangi dunia politik. Dan gereja harus *"take control"* terhadap aktifitas perpolitikan. Dasar pemikiran mulia ini tentu menjadi acuan yang tidak perlu dibantah oleh para teolog Kristen maupun dari kalangan non teolog sekalipun⁴⁸

Ada satu hal yang sedikit mengganggu pikiran, yaitu tanggung jawab penggunaan ayat-ayat Alkitab ditangani oleh praktikus, dan juga sangat ironis jika kemudian ada teolog yang terkesan mengikut dan berbalik menjadi pendukung teologi dari kalangan "teolog non akademika". Kemungkinan bahwa teolog yang digali adalah merupakan hasil dari racikan para teolog yang kompeten untuk mendukung peranan gereja dalam dunia politik. Bahkan akan berbahaya jika teologinya digali dengan metode eisegese dan pendistribusiannya penuh interpretasi kepentingan.⁴⁹ Pelayanan Yesus Kristus yang dilatarbelakangi keadaan politik yang kurang kondusif.

Kaum Yahudi yang berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa lain sejak masa Perjanjian Lama, hingga penjajahan Romawi pada masa Kristus, mendambakan sosok idialis sebagai pemimpin bangsa dan membawa perubahan politik yang revolusioner. Pada waktu itu, dalam pemukiran umat Yahudi tentang kerajaan Allah ialah pemikiran materialitis yaitu diyakini, bahwa Allah akan membangun suatu kerajaan duniawi

⁴⁶ Daniela Carstea, "Church and State, Church in State," *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE AND BUSINESS ADMINISTRATION* 7, no. 4 (2021): 23–28, <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.74.1003>; Esbeck, "Five Views of Church-State Relations in Contemporary American Thought."

⁴⁷ Ngelow, "Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik"; Zakaria J. Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (October 2, 2014): 213–34, <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>; Sproul, "What Is a Christian's Responsibility to Government?"

⁴⁸ *ibid*, 27.

⁴⁹ Yunus Doang, "PANDEMI COVID 19 DAN KEMISKINAN ; SUATU PRESPEKTIF TEOLOGI KRISTEN," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 4, no. 1 (February 10, 2021): 20–33, <https://doi.org/10.36972/jvow.v4i1.71>; Batalla and Baring, "Church-State Separation and Challenging Issues Concerning Religion."

melalui seorang mesias. Kerajaan duniawi itu akan memerintah seluruh dunia dan menjadikan Yahudi menjadi bangsa penguasa atas semua bangsa lain. Harapan itu bukanlah harapan kosong bagi mereka mengingat kejayaan kerajaan Daud pada masa lampau. Maka tidak terlalu mengherankan ketika pengingkaran diri yang dilakukan oleh Yesus sebagai penggenapan nubuatan tentang Mesias, mendapat reaksi keras dari bangsa Yahudi. Dan dalam hal ini, Yesus tidak memiliki kekuatan seperti kriteria umat Yahudi yang memiliki kenangan kemegahan masa lalu.⁵⁰ Yesus tampil seorang diri tanpa kekuatan politik dan militer. Adalah kenyataan yang tidak terpungkiri, bahwa Yesus tidak mempermasalahkan gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Dalam tulisan Injil sinoptis, tidak ada informasi yang memberikan keterangan secara akurat mengenai peran serta Yesus dalam dunia politik. Dalam Lukas 20:22 adalah ayat yang memang bersinggungan dengan pemerintah, yaitu kewajiban membayar pajak. Akan tetapi, ayat tersebut adalah sebuah jebakan untuk mematikan Yesus dengan bahasan politik. Dan jawaban Yesus tersebut, justru mengisyaratkan adanya pengklasifikasian yang jelas antara dunia politik dan kerajaan Allah.⁵¹ Yesus selalu berada pada sisi kerajaan Allah dengan tidak mau mempersoalkan masalah politik.

Selama pelayanan Yesus di dunia, Ia tidak menyuarakan perubahan pranata sosial berdasarkan idealisme ketatanegaraan, tetapi memberitakan keselamatan jiwa yang sangat pribadi dan adikodrati. Seorang Pilatus tidak melihat ancaman politik dalam diri Yesus Kristus ketika Ia dihadapkan dalam peradilan, karenanya Pilatus berusaha mencoba membebaskan Yesus karena menurutnya masalah Yesus dengan pemuka Yahudi adalah murni masalah keagamaan.⁵² Maka pada akhir pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah harus menggunakan pedang untuk melindungi kehidupan, mengaktifkan mandat budaya, dan menyediakan landasan bagi pekerjaan gereja. Mereka adalah penjaga zaman sekarang ini. Gereja-gereja harus menjalankan kunci-kunci kerajaan untuk bersaksi tentang Raja Yesus, pesannya, dan rakyatnya. Mereka adalah saksi dari zaman yang akan datang.

⁵⁰sintaronauli1991975.blokspot.com>gereja-dan- polit.html

⁵¹ Ernst H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study in A Mediaeval Political Theology*, 3rd ed. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2016).

⁵² Amran Simangunsong, "INTERFAITH DIALOGUE IN INDONESIA AND LUTHER'S TWO KINGDOMS CONTRIBUTION," *MAHABBAH: Journal of Religion and Education* 2, no. 2 (2021): 143–56, <https://mahabbah.org/e-journal/index.php/mjre/article/view/27>; Sproul, "What Is a Christian's Responsibility to Government?"

KESIMPULAN

Dalam upaya ini, pembangunan bangsa berupaya menciptakan identitas nasional yang kuat yang mengakui keragaman dan narasi sejarah seluruh rakyatnya. Ketika sebuah bangsa terbagi berdasarkan garis etnis, agama, dan ras, selalu ada ketegangan yang tidak sehat dan kurangnya kekompakan untuk tumbuh dan berkembang, karena berbagai kelompok menjadi skeptis dan membenci satu sama lain. Selain itu, pembangunan bangsa membutuhkan ketersediaan masyarakat lokal untuk mengambil alih sebagian besar tugas pemerintah. Oleh karena itu, tugas pembangunan bangsa harus bersifat holistik dalam merangkul reformasi yang mempengaruhi keamanan, kesejahteraan ekonomi, pengembangan kelembagaan, dan demokrasi. Ini juga harus mencakup komitmen terhadap keadilan transisional. Tugas ini menuntut kita untuk menjadi sosio-etis dan teopolitik.

REFERENSI

-
- Batalla, Eric, and Rito Baring. "Church-State Separation and Challenging Issues Concerning Religion." *Religions* 10, no. 3 (March 15, 2019): 197.
<https://doi.org/10.3390/rel10030197>.
- Borong, Robert P. *Etika Politik Kristen Serba-Serbi Politik Praktis*. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi dan Pusat Studi Etika, 2006.
- Burke, Greg F. "Book Review: Church, State, and Society: An Introduction to Catholic Social Doctrine Church, State, and Society: An Introduction to Catholic Social Doctrine by BenestadJ. Brian Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2010. 500 Pp." *The Linacre Quarterly* 79, no. 3 (August 2012): 373–75.
<https://doi.org/10.1179/002436312804872776a>.
- Carstea, Daniela. "Church and State, Church in State." *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE AND BUSINESS ADMINISTRATION* 7, no. 4 (2021): 23–28.
<https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.74.1003>.
- Chong, Sin Wang, Ting Jun Lin, and Yulu Chen. "A Methodological Review of Systematic Literature Reviews in Higher Education: Heterogeneity and Homogeneity." *Educational Research Review* 35 (February 2022): 100426.
<https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100426>.
- Dennis, Josiah. "When Should Christians Obey the Government?" Proclaim & Defend: A Ministry of The FBFI, 2020.

<https://www.proclaimanddefend.org/2020/08/21/when-should-christians-obey-the-government/>.

Doang, Yunus. "PANDEMI COVID 19 DAN KEMISKINAN ; SUATU PRESPEKTIF TEOLOGI KRISTEN." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 4, no. 1 (February 10, 2021): 20–33. <https://doi.org/10.36972/jvow.v4i1.71>.

Esbeck, Carl H. "Five Views of Church-State Relations in Contemporary American Thought." University of Missouri School of Law, 1986.
<https://core.ac.uk/download/pdf/217048834.pdf>.

Grundem, Wayne. *Systematic Theology: An Introduction To Biblical Dotrine*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2009.

Hakh, Samuel Benyamin. "Peranan Orang Kristen Dalam Pusaran Politik Di Indonesia (Suatu Tinjauan Historis -Teologis)." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (November 25, 2019): 1–14.
<https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.15>.

Kantorowicz, Ernst H. *The King's Two Bodies: A Study in A Mediaeval Political Theology*. 3rd ed. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2016.

Labolo, Muhadam. *Etika Pemerintahan*. 1st ed. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016.

Leeman, Jonathan. "The Relationship of Church and State." The Gospel Coalition, 2019.
<https://www.thegospelcoalition.org/essay/the-relationship-of-church-and-state/>.

Leung, Beatrice. "Church–State Relations in the Transition: A Historical Perspective." In *Hong Kong in Transition*, 229–47. London: Palgrave Macmillan UK, 2000.
https://doi.org/10.1057/9780333977262_13.

Levinson, Rosalie Berger. "Separation of Church and State: And the Wall Came Tumbling Down." *Valparaiso University Law Review* 18, no. 4 (1984): 707–39.
<https://scholar.valpo.edu/vulr/vol18/iss4/1>.

Luchte, James. "Marx and the Sacred." *Journal of Church and State* 51, no. 3 (2009): 413–37. <http://www.jstor.org/stable/23921627>.

Mbaya, Henry. "Friendships and Fellowship: Living Koinonia, Martyria and Diakonia in the Corinthian Church of South Africa – from the Perspective of Social Capital." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 68, no. 2 (February 14, 2012).
<https://doi.org/10.4102/hts.v68i2.1169>.

Napitupulu, Pieter Anggiat, Agus Santoso, and Bobby Kurnia Putrawan. "Rereading

- Qahal as Deuteronomist History Works: Literal and Ideological Criticism Approach." *KURIOS* 8, no. 1 (April 30, 2022): 163.
<https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.287>.
- Ngelow, Zakaria J. "Beberapa Catatan Mengenai Politik Kristen Di Indonesia." In *Teologi Politik, Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pasca Orde Baru*. Makassar: Yayasan OASE INTIN, 2013.
- . "Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950." Institut Leimena, 2018.
<https://leimena.org/kekristenan-dan-nasionalisme/>.
- . "Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik." In *Teologi Politik, Panggilan Gereja Dibidang Politik Pasca Orde Baru*. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
- . "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (October 2, 2014): 213–34.
<https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.
- O'Donovan, Oliver, and Joan Lockwood O'Donovan. *From Irenaeus to Grotius: A Sourcebook in Christian Political Thought*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Pfeffer, Leo. "Church and State: Something Less than Separation." *The University of Chicago Law Review* 19, no. 1 (1951): 1. <https://doi.org/10.2307/1597719>.
- Phang, Stephen, and Bobby Kurnia Putrawan. *Roh Kudus Dan Karya-Nya Bagi Gereja*. 1st ed. Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, 2020.
- Piper, Rory J. "How to Write a Systematic Literature Review: A Guide for Medical Students." *National AMR* 1, no. 2 (2013): 1–8.
- Putrawan, BK, Edi Sugianto, Yan Kristianus Kadang. "Refleksi Pada Relasi Antara Teologi Dan Filsafat Dalam Perspektif Teologi Injili." *Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 223–34. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.218>.
- Putrawan, Bobby Kurnia. "Pengantar Latar Belakang Kitab Kisah Para Rasul (Introduction To Acts Background)." *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 1, no. 2 (2019): 176–83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46362/quaerens.v1i2.8>.
- Robbins, Thomas. *Church-State Relations: Tensions and Transitions*. 1st ed. London, UK: Routledge, 1987.
- Robert, Marie, Monique Séguin, and Kieron O'Connor. "The Evolution of the Study of Life

Trajectories in Social Sciences over the Past Five Years: A State of the Art Review.” *Advances in Mental Health* 9, no. 2 (October 17, 2010): 190–205.

<https://doi.org/10.5172/jamh.9.2.190>.

Simangunsong, Amran. “INTERFAITH DIALOGUE IN INDONESIA AND LUTHER’S TWO KINGDOMS CONTRIBUTION.” *MAHABBAH: Journal of Religion and Education* 2, no. 2 (2021): 143–56. <https://mahabbah.org/e-journal/index.php/mjre/article/view/27>.

Snyder, Hannah. “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines.” *Journal of Business Research* 104 (November 2019): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

Sosipater, Karel. *Etika Pribadi*. Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2012.

Sproul, R.C. “What Is a Christian’s Responsibility to Government?” Ligonier. Accessed November 19, 2016. <https://www.ligonier.org/learn/articles/christians-and-government>.

Torrance, Thomas F. “The Mission of the Church.” *Scottish Journal of Theology* 19, no. 2 (1966): 129–43. <https://doi.org/10.1017/S0036930600002921>.

Walker, Andrew T. “Freedom of Religion and the Christian Ethics of the Nation-State.” Providence, 2019. <https://providencemag.com/2019/01/freedom-of-religion-and-the-christian-ethics-of-the-nation-state/>.

Winchester, Catherine L, and Mark Salji. “Writing a Literature Review.” *Journal of Clinical Urology* 9, no. 5 (September 23, 2016): 308–12. <https://doi.org/10.1177/2051415816650133>.